INTEGRASI

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 44 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 44

KABUPATEN SUKOHARJO: 8 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERINTEGRASI

ABSTRAK :

- Dalam rangka mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan maka perlu dilakukan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu terintegrasi;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap menerima dan memverifikasi berkas permohonan sampai dengan tahap penyerahan dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Permen Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perbup Sukoharjo No. 50 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang;
  1. Ketentuan umum;
  2. Maksud dan tujuan;
  3. Ruang lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu terintegrasi
  4. Pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu satu pintu terintegrasi
  5. Pelaksanaan; dan
  6. Ketentuan penutup.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 3 Agustus 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2020.